

Analisa Dampak Sosial Ekonomi Kuantitatif PPK I

Dalam sepuluh tahun terakhir, banyak sekali program pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung, dari proses pengambilan keputusan sampai pada pengelolaan dananya. Program pembangunan seperti ini diyakini lebih baik. Itulah salah satu alasan Bank Dunia turut terlibat dalam pendanaan program-program seperti itu. Bahkan, alokasi dana yang digulirkan Bank Dunia untuk program-program tersebut terus meningkat, dari 325 juta dolar AS pada 1996 menjadi 2 miliar dolar AS pada 2003. Di Indonesia, PPK dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pembangunan partisipatif terbesar dengan pendanaan yang besar pula, yakni mencapai 809 juta dolar AS sejak 1998 sampai saat ini.

PPK memiliki beberapa keunggulan. Pertama, memudahkan akses informasi. Masyarakat lebih mengetahui apa yang dibutuhkannya, dimana kantong-kantong kemiskinan dan penyebabnya, karena mereka mengalaminya sendiri. Kedua, membuka akses ke sumber pendanaan melalui pinjaman dan bantuan sosial. Ketiga, memperkenalkan good governance, keterbukaan, tanggung jawab dan partisipasi dalam pembangunan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat. Namun, apakah benar program pembangunan seperti itu memberi dampak positif seperti yang diharapkan?

Studi yang dilakukan Konsultan Bank Dunia pada Pebruari-April 2005, dapat memberi gambaran dampak ekonomi kuantitatif dari PPK I. Studi ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan, apakah PPK memang untuk masyarakat kurang mampu? Dari data lokasi target (yang dipilih) PPK diketahui bahwa tingkat kemiskinan di kecamatan lokasi PPK sebesar 24,36, sedangkan di lokasi non-PPK hanya 13,93 persen. Total populasi di lokasi PPK mencapai 20 persen dari total penduduk Indonesia, dimana sebanyak 30 persen masyarakat kurang mampu tinggal di kecamatan.

Studi juga mencoba menjawab apakah target yang dibidik PPK sudah optimal atau dapat lebih ditingkatkan lagi? Dari percobaan sederhana dengan peta kemiskinan yang dibuat BPS diketahui, bila pemilihan lokasi PPK didasarkan pada jumlah masyarakat miskin, maka 986 kecamatan lokasi PPK I akan meliputi 52 persen masyarakat miskin, bukan hanya 30 persen dengan tingkat kemiskinan mencapai 28 persen, bukan hanya 24,36 persen. Sebaliknya, kalau pemilihan kecamatan didasarkan pada tingkat kemiskinan, cakupannya bisa mencapai 38 persen, lebih besar dari angka sebenarnya (30 persen) atau mencakup 40 persen masyarakat miskin, bukan hanya 24,36 persen.

Lalu juga pertanyaan apakah PPK mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa? Bila ya, seperti apa? Apakah ada perubahan pada kecamatan yang telah mengikuti PPK? Bagaimana dengan kecamatan yang tingkat partisipasi masyarakatnya lebih tinggi? Pada 2003, PPK Siklus I, setiap keluarga diperkirakan mendapat tambahan per kapita Rp1.720 setiap bulan atau Rp 82.560 per tahun atau naik lima persen dari 1998. Pada PPK Siklus II menjadi sekitar 3,1 persen dari 1998 dan pada Siklus III sebesar 0,3 persen dari 1998.

Tingkat pengembalian investasi juga meningkat setiap siklus. Pada 2001, tingkat pengembalian untuk Siklus I sebesar 22,01 persen, Siklus II 6,32 persen. Pada 2002, pengembalian Siklus I sebesar 47,53 persen, sedangkan Siklus II mencapai 40,30 persen. Pada 2003, pengembalian Siklus I, II dan III, masing-masing 60,35 persen, 53,84 persen dan 13,90 persen. Kecamatan dengan tingkat partisipasi rendah dalam MAD II, kualitas keaktifannya hanya 2/3 dari kecamatan dengan tingkat partisipasi tinggi. Soal swadaya, ternyata keuntungan pada kecamatan yang tingkat swadayanya rendah hanya separuh dari yang tingkat swadayanya tinggi.